

**EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA MART DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA
SARANG GITING KECAMATAN DOLOK MASIHUL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI



OLEH:

JUNIPER PANJAITAN
198520177

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)13/11/23

**EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA MART DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA
SARANG GITING KECAMATAN DOLOK MASIHUL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Dan Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area

OLEH:

JUNIPER PANJAITAN

198520177

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/11/23


Access From (repository.uma.ac.id)13/11/23


LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Mart Dalam Meningkatkan
Pendapatan Masyarakat Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok
Masihul Kabupaten Serdang Bedagai


Nama : Juniper Panjaitan
Npm : 198520177
Prodi : Administrasi Publik

UNIVERSITAS
Discetujui Oleh
Komisi Pembimbing
UMA


Dr. Budi Hartono, M.Si
Pembimbing I


Marlina Deliana S.AB, M.AB
Pembimbing II


Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si
Dekan


Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.I.Pol
Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 02 Oktober 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

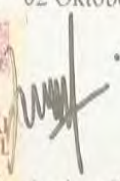
Nama : Juniper Panjaitan
NPM : 198520177
Tempat/Tanggal Lahir : Hutanauli, 07 April 2000
Alamat : Dusun IX, Desa Blok Sepuluh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Mart Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai”** adalah benar merupakan karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain, dengan karya yang sama, kecuali acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim berdasarkan ketentuan universitas.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar, tanpa dipengaruhi oleh apa pun. Jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan kepada saya, termasuk pencabutan gelar Sarjana Administrasi Publik yang nanti saya dapatkan.

Medan, 02 Oktober 2023




Juniper Panjaitan
198520177

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/ SKRIPSI/ TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama : Juniper Panjaitan

NPM : 198520177

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan
kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Noneklusif (*Non-exclusif Royalty
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Efektivitas Badan Usaha
Milik Desa Mart Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa
Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai”**
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih
media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat,
dan memublikasikan tugas akhir /skripsi saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta, Demikian
pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

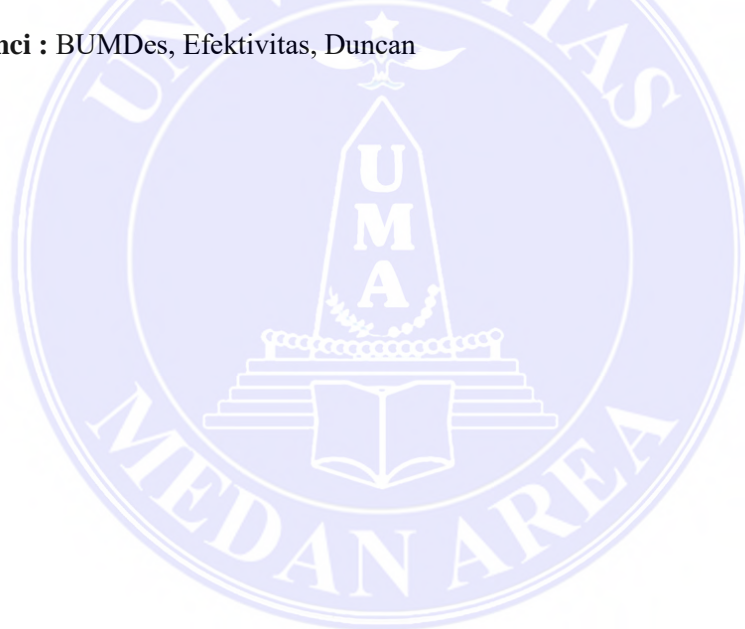
Medan, 02 Oktober 2023


10000
METERAI
TEMPEL
Juniper Panjaitan
198520177

ABSTRAK

Pengembangan perekonomian dipedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. BUMDes didirikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk melayani kebutuhan masyarakat desa setempat dibidang usaha. BUMDes Mart Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai merupakan jenis usaha yang berupa usaha dagang pangan dan sembako dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas dengan pengukuran efektivitas Duncan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Selama penelitian ini berlangsung, peneliti menemukan data bahwa BUMDes Mart Desa Sarang giting masih belum efektif karena tidak memenuhi syarat dalam teori Duncan. Adapun syarat yang tidak terpenuhi adalah pencapaian tujuan dan juga adaptasi. Sementara syarat yang terpenuhi yaitu integrasi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan kepada Desa Sarang Giting untuk memperbaiki penerapan BUMDes Mart sehingga bisa memenuhi semua syarat yang dinyatakan dalam pengukuran efektivitas Duncan.

Kata kunci : BUMDes, Efektivitas, Duncan



ABSTRACT

BUMDes Mart Sarang Giting Village Dolok Masihul District Serdang Bedagai Regency is one type of business in the form of food, This research uses qualitative research with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. During this research, researchers found data that BUMDes Mart Sarang Giting Village is still not effective because it does not meet the requirements in Duncan's theory. The conditions that are not met are goal achievement and adaptation. This research is expected to be a reference to improve the implementation of BUMDes Mart so that it can meet all the requirements in Duncan's effectiveness measurement.

Keywords: *BUMDes, Effectiveness, Duncan*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Juniper Panjaitan
Tempat/Tanggal Lahir : Hutanauli, 07 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Anak ke : Empat dari Empat Bersaudara
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun IX, Desa Blok Sepuluh
Email : junipanjaitan07@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

Tamatan **SD Negeri 102069, Blok Sepuluh** : Tahun 2012 (Berijazah)
Tamatan **SMP Negeri 3, Dolok Masihul** : Tahun 2015 (Berijazah)
Tamatan **SMA SW Surya Nusantara, T.Tinggi** : Tahun 2018 (Berijazah)
Berkuliah di **Universitas Medan Area** : Tahun 2019 (Belum Lulus)

3. Data Orangtua

Nama Ayah : Saut Panjaitan
Nama Ibu : Marlija Siburian
Pekerjaan : Bertani
Riwayat Sekolah : SMP Sederajat

4. Pengalaman Kerja

Pernah bekerja di salah satu *cafe* di Kota Medan, tepatnya di Bloum Coffee, beralamat di Jalan Pasar Baru No.55, Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada Oktober 2020 sampai Oktober 2021.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mart Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai" dengan baik.

Besar harapan penulis semoga penulisan skripsi ini bisa menambah pengetahuan untuk para pembaca. Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan penulisan skripsi ini, karena pengetahuan dan pengalaman penulis masih terbatas. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan orang-orang hebat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M,Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku ketua jurusan Program studi Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si selaku dosen pembimbing I yang sudah banyak mengarahkan dan mengevaluasi proposal skripsi penulis, dan juga menyempatkan waktunya dengan memberikan bimbingan, hingga proposal skripsi ini dapat diselesaikan penulis.

5. Ibu Marlina Deliana, S.AB, M.AB sebagai dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan, saran, dan dorongan motivasi untuk membantu penulis.
6. Ibu Chairika Nasution, S.AP, M.AP selaku dosen sekretaris penulis.
7. Ibu tercinta yang sudah memberikan dukungan secara moral dan materi serta doa yang tiada hentinya.
8. Kepala Desa Sarang Giting yang sudah menerima dengan baik untuk melakukan riset dan juga berkenan sebagai informan penelitian
9. Sekretaris Desa Sarang Giting yang berkenan membantu peneliti untuk mengumpulkan data-data serta dokumen terkait penelitian ini.
10. Ketua BUMDes Mart Desa Sarang Giting yang sudah berkenan untuk memberikan informasi terkait dengan penelitian ini
11. Semua masyarakat Desa Sarang Giting yang juga telah memberikan informasi terkait dengan penelitian ini
12. Kepada diri sendiri yang tetap semangat dan fokus dalam mengerjakan skripsi hingga selesai.

Medan, 2 Oktober 2023

Penulis

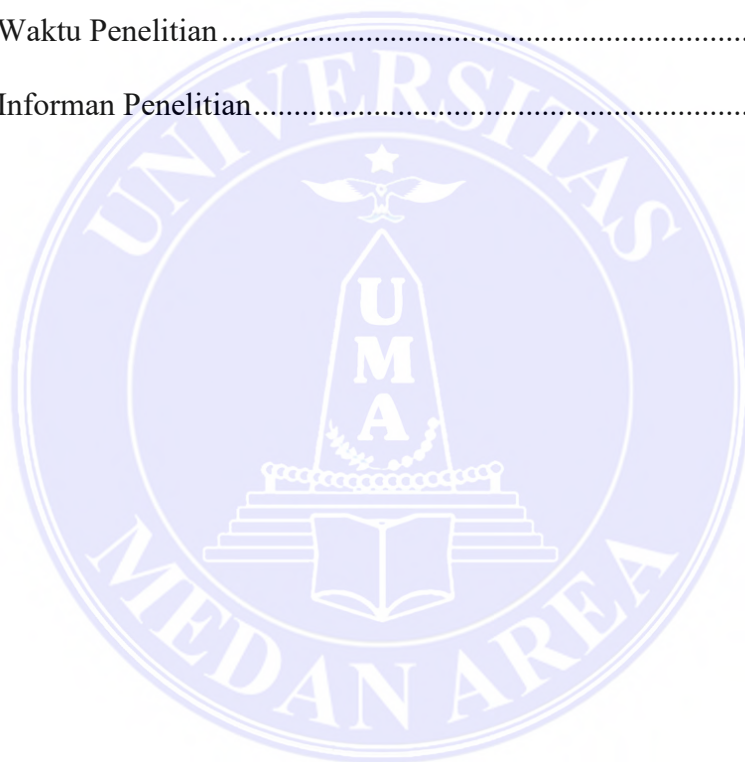
Juniper Panjaitan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Efektivitas.....	9
2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	15
2.3 Pendapatan Masyarakat	28
2.4 Penelitian Terdahulu.....	29
2.5 Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.3 Informan Penelitian	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.5 Teknik Analisa Data.....	40
3.6 Defenisi Konsep Dan Operasional	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	46
4.2 Hasil Penelitian.....	52
4.3 Pembahasan Penelitian	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pendapatan BUMDes Mart 2019-2021	7
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3 Kerangka Berpikir.....	35
Tabel 4 Waktu Penelitian	37
Tabel 5 Informan Penelitian.....	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Analisis Data Miles dan Humberman43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Wawancara	73
Lampiran Gambar	76
Lampiran Surat Pengambilan Data/Riset	79
Lampiran Surat Keterangan Selesai	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara republik yang merupakan negara kesatuan dan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Indonesia dipecah menjadi beberapa daerah atau daerah provinsi, dan setiap daerah atau daerah memiliki beberapa kabupaten atau kota. Selain itu, desa dan kelurahan merupakan satuan pemerintahan terendah di setiap wilayah kabupaten atau kota. Akibatnya, unit administrasi pemerintahan kabupaten/kota yang paling rendah adalah desa dan kecamatan. Dua unit administrasi terendah, desa dan kelurahan, memiliki status yang berbeda. Kecamatan merupakan satuan pemerintahan administratif yang hanya merupakan kepanjangan dari pemerintahan kabupaten atau kota, sedangkan desa merupakan satuan pemerintahan yang diberikan hak otonomi adat menjadi badan hukum.

Dalam hal ini, kelurahan hanyalah suatu lokasi di mana pemerintah kabupaten atau kota memberikan pelayanan pemerintahan kepada wilayah kelurahan. Itu bukan badan hukum. Sedangkan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum (adat) dengan batas-batas tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asalnya.

Pengembangan perekonomian di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha mendorong yang perkembangan perekonomian secara sehat, baik

dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya, maupun turut serta dalam membangun sistem perekonomian nasional sebagai organisasi ekonomi. Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat salah satunya yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu: a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan b) *Political will* dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat mengimplementasikan dalam perencanaan pembangunan yang sudah disusun.

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun masyarakat desa.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemerintah daerah mengatur urusan daerah. Gubernur, Bupati, dan Walikota membawahi

pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam lingkungan Negara Kesatuan. Sistem Negara Republik Indonesia. Hal ini berarti memberikan kesempatan kepada daerah tertinggal atau terpencil secara ekonomi untuk mengembangkan perekonomiannya karena adanya sistem pemerintahan yang terdesentralisasi berdasarkan otonomi daerah. Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil, daerah tertinggal, atau daerah terpencil di Indonesia.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk melayani kebutuhan masyarakat desa setempat di bidang usaha. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat memperlancar kegiatan perekonomian di pedesaan. Badan Usaha Milik Desa lahir sebagai strategi baru dalam upaya meningkatkan perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Adanya peraturan ini memungkinkan pemerintah untuk mulai menetapkan dan menerapkannya di desa atau lokasi lain yang setara dengan desa. Seluruh pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh anggota masyarakat desa dari, untuk, dan untuk desa.

Badan Usaha Milik Desa berfungsi dengan mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat dalam struktur kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional dengan tetap mengandalkan potensi asli desa. Ke depan, Badan Usaha Milik Desa akan menjadi pilar kemandirian bangsa dan lembaga yang mewadahi kegiatan ekonomi kerakyatan yang berkembang sesuai dengan karakteristik desa

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dapat membuat bisnis komunitas lebih produktif dan efektif. Badan Usaha Milik Desa telah muncul sebagai salah satu jenis Badan Usaha setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang juga memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa secara keseluruhan. Diharapkan pemerintah mampu menciptakan lingkungan usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Sehingga kelompok-kelompok tertentu yang bermodal besar di pedesaan tidak menguasai keberadaan lembaga-lembaga ekonomi tersebut. Desa kemudian memiliki dan bersama-sama menjalankan lembaga yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Kondisi persaingan yang dihadapi BUMDes dengan pelaku ekonomi lainnya tidak lepas dari perkembangannya. BUMDes, lembaga sosial dan komersial yang berfungsi sebagai penopang kegiatan ekonomi desa.

Dasar BUMDes adalah UU No. 98 yang merupakan kontrak. “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desanya,” bunyi alinea 1 pasal 231 UU Pemda tahun 2004, selain PP No. Pasal 78, 79, 80, dan 81 UU Desa Sementara itu, pendirian BUMDes sebagai usaha desa pada tahun 2005 bertujuan untuk menampung semua kegiatan yang meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk yang dilimpahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maupun yang berkembang sesuai dengan adat istiadat setempat, dan program untuk proyek-proyek pemerintah daerah. Pengelolaan ekonomi produktif desa yang kooperatif, partisipatif, emansipatoris, transparan, akuntabel, dan berjangka panjang, semuanya dicontohkan dengan pendirian BUMDes. Agar

pengelolaan BUMDes dapat berfungsi secara mandiri, profesional, dan efektif, diperlukan upaya yang signifikan. BUMDes membantu masyarakat baik produktif maupun konsumtif mencapai tujuannya dengan mendistribusikan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa.

Menurut Bupati Ir Soekirman, tujuan kedatangannya sebagai bupati adalah untuk melaksanakan tanggung jawab utama pemerintah, pembangunan, dan masyarakat guna mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur dari anggaran ADD/DD tahun 2019. Desa yang belum membayar pajak tepat waktu. Soekirman mengingatkan, kinerja APBD 2020 tidak akan defisit karena tambahan pembangunan akan dibiayai dari pajak kita. Syarat untuk memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI terpenuhi jika belanja daerah tidak mengalami defisit. Kabupaten ini sangat bergantung pada pendapatan, tetapi pendapatan daerah saat ini, seperti pajak, mengalami defisit, terutama selama COVID-19, ketika pendapatan pajak daerah menjadi fokus.

Baik ADD (Alokasi Dana Desa) maupun DD (Dana Desa) mengalami realokasi dan reorientasi yang signifikan terhadap desa itu sendiri. Akibatnya, banyak rencana pembangunan infrastruktur yang tertunda atau bahkan dibatalkan, dan BLT diambil alih untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Soekirman berharap Kepala Desa segera melunasi utang pajak tahun anggaran 2019 yang timbul akibat pembangunan infrastruktur yang dibiayai ADD/DD. Selain itu, Soekirman mengimbau kepada para kepala desa untuk memanfaatkan bekas gudang KUD yang telah diubah menjadi DesMart dan sekarang berfungsi sebagai pasar untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat dan berkontribusi pada pendapatan

desa sendiri, untuk meningkatkan kemampuan desa untuk mereplikasi dan mempromosikan bisnis dan inovasi. Dalam rangka mendongkrak perekonomian masyarakat, Kepala Desa Sarang Giting membuka BUMDes Mart dengan tagline “Belanja Lengkap, Murah, Nyaman”.

BUMDes yang terletak di Desa Sarang Giring Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Sumber dana BUMDes Sarang Giring dikelola sendiri untuk mencapai tujuan dari pendirian BUMDes itu sendiri yaitu mensejahterakan masyarakat. Jenis usaha yang ada pada Badan Usaha Milik Desa Sarang Giting ini adalah berupa usaha dagang pangan dan sembako. Karena BUMDes diperuntukkan bagi masyarakat yang penghasilannya tergolong sangat rendah, maka BUMDes juga dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari serta memenuhi kebutuhannya. Namun dari adanya bantuan tersebut, tidak menjamin bahwa BUMDes akan selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Setiap usaha yang dijalankan baik usaha perdagangan ataupun usaha jasa, tentunya akan mengalami suatu masalah atau kendala dalam menjalankannya. BUMDes salah satunya, walaupun tujuan didirikannya BUMDes ini adalah untuk membantu masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan BUMDes tersebut mendapatkan masalah.

Dalam penelitian ini digunakan survei lapangan untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi BUMDes Mart terhadap pendapatan masyarakat di Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

Tabel 1 Pendapatan BUMDes Mart 2019-2021

Pendapatan BUMDes Mart			
No.	Tahun	Target	Terealisasi
1.	2019	Rp 5.000.000,00	Rp 2.550.000,00
2.	2020	Rp 12.000.000,00	Rp 9.420.000,00
3.	2021	Rp 4.000.000,00	Rp 1.275.492,00

Sumber : BUMDes Desa Sarang Giting, 10 Desember 2022

Berdasarkan informasi diatas, penulis ingin meneliti Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mart Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mart Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mart Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mart Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mart Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Memberi pengetahuan ilmu administrasi publik tentang Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mart Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan kepada masyarakat tentang Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mart Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional adalah ukuran utama efektivitas. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata “efektif” berasal dari kata dasar “efektif” yang berarti “akibat”, “pengaruh”, atau “kesesuaian” dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sasaran yang dituju. Sejauh mana seseorang menghasilkan output yang sesuai dengan harapan merupakan indikator efektivitas. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu tugas dapat dikatakan efektif terlepas dari waktu, tenaga, atau faktor lain jika dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Hal ini berbeda dengan efektivitas pelaksanaan otonomi yang menyebutkan sejauh mana pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan, diwujudkan, dan ditingkatkan, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Sondang P. Siagian (2001 : 24) berpendapat bahwa efektivitas adalah penggunaan secara sengaja sejumlah infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya tertentu untuk menghasilkan sejumlah produk atau jasa. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dengan menentukan apakah tujuan yang ditetapkan telah terpenuhi. Kegiatan lebih efektif ketika hasil mereka semakin dekat dengan tujuan.

Menurut S.P. Siagian (2005:171), ketika seseorang mengacu pada efektivitas sebagai orientasi kerja, berarti tujuannya adalah untuk memenuhi

berbagai tujuan secara tepat waktu dengan memanfaatkan sumber daya tertentu yang harus dipilih terlebih dahulu dan dengan memanfaatkan sumber daya tersebut. Sumber daya hasil tertentu harus dicapai dalam kerangka waktu yang ditentukan.

Insentif selalu melibatkan banyak individu yang berinteraksi satu sama lain. Untuk membantu mencapai tujuan bersama, interaksi ini dapat diatur atau dijelaskan dalam suatu struktur. Namun, setiap anggota organisasi memiliki tujuan mereka sendiri. Dia mengantisipasi bahwa, selain tujuan kelompok, organisasi akan membantunya mencapai tujuannya sendiri dengan berpartisipasi di dalamnya.

Konsep efektivitas biasanya digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan organisasi; namun, definisi efektivitas sangat bervariasi di kalangan praktisi dan akademisi. Dalam bisnis, individu yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tidak hanya terdiri dari sekelompok orang tetapi juga peralatan, seperti mesin, metode kerja, waktu, dan material, yang biasanya disebut sebagai sumber daya. Setiap organisasi ingin memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dan sumber daya ini digunakan secara efektif. Akibatnya, ada permintaan untuk kontrol, arah, dan aplikasi. Manajemen adalah proses mengatur dan mengarahkan sumber daya ini baik orang maupun peralatan.

Mardiasmo (2019:132) lebih lanjut menjelaskan bahwa efektivitas terutama terkait dengan pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan (utilitas). Hubungan antara keluaran dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai disebut dengan efektivitas. Jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran kebijakan akhir, maka kegiatan operasional efektif.

Kualitas hubungan organisasi dengan lingkungannya dapat diukur dengan menggunakan efektivitas organisasi. Dapat dikatakan bahwa, secara paradoks, suatu organisasi mungkin efektif (memiliki hubungan jangka panjang dengan lingkungannya) tetapi tidak efisien (penuh pemborosan secara internal). Kemudian menurut Richard, M. Streert (2004:205), ada empat aspek efektivitas organisasi:

1. Cara mengorganisasikan orang untuk membentuk organisasi adalah melalui karakteristik organisasi, yang meliputi struktur organisasi dan struktur teknologi.
2. Lingkungan luar dan lingkungan dalam merupakan dua aspek yang saling berhubungan yang dicapai oleh karakteristik lingkungan. lingkungan eksternal, atau semua kekuatan dalam lingkungan yang terjadi di luar organisasi. Iklim organisasi, atau lingkungan internal, semata-mata terdiri dari berbagai karakteristik lingkungan.
3. Karakteristik tempat kerja mempertimbangkan tujuan, persyaratan, dan kemampuan berbagai individu. Rasa memiliki terhadap organisasi dan kinerja di tempat kerja secara langsung dipengaruhi oleh hal ini.
4. Kesuksesan organisasi melalui perencanaan dan koordinasi memerlukan kebijakan dan praktik manajemen untuk memperlancar kegiatan sasaran.

Tingkat kelekatan keluaran yang dicapai adalah seberapa besar keluaran yang diharapkan dari sejumlah masukan, sebagaimana dapat dijelaskan dari pengertian sebelumnya. Jika pekerjaan dilakukan tepat seperti yang direncanakan, maka dapat dilakukan dengan benar, efektif, dan efisien.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Karena keefektifan dapat dipelajari dari berbagai perspektif dan bergantung pada siapa yang mengevaluasi dan menafsirkannya, mengukur keefektifannya bukanlah tugas yang mudah. Seorang manajer produksi memberikan pengertian bahwa efektivitas mengacu pada kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan (output). Dengan mengkontraskan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil aktual yang telah dicapai, tingkat efektivitas juga dapat diukur. Namun, dianggap tidak efektif jika hasil dan tindakan pekerjaan tidak sesuai, sehingga tujuan tidak tercapai atau salah sasaran.

Duncan menekankan bahwa pengukuran efektivitas sebuah organisasi dalam menghadapi perubahan harus terpenuhi semuanya tanpa terkecuali (Duncan, 1985). Untuk variable pertama yaitu pencapaian tujuan dengan 3 indikator yaitu waktu pencapaian, sasaran dan tujuan serta terakhir dasar hukum. Variable kedua yaitu integritas dengan indikator prosedur pelaksanaan program dan sosialisasi. Variabel Ketiga yaitu Adaptasi dengan indikator pengembangan kemampuan dan sarana prasarana.

Efektif atau tidaknya kriteria atau ukuran untuk menentukan pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari ini adalah untuk memastikan bahwa karyawan dapat mencapai tujuan yang diarahkan dalam pekerjaan mereka dan bahwa tujuan organisasi dapat dipenuhi.
2. Strategi untuk mencapai tujuan jelas. Diketahui bahwa strategi tersebut “on the road”, dan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan yang

telah ditentukan agar para pelaksana tidak tersesat dalam mencapai tujuan organisasi.

3. Kebijakan yang kokoh harus mampu menjembatani tujuan dengan upaya pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bagian dari proses analisis dan perumusan kebijakan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang telah ditetapkan.
4. Intinya, perencanaan yang cermat memerlukan keputusan sekarang apa yang akan dilakukan organisasi di masa depan.
5. Pemrograman rencana yang baik masih harus diterjemahkan ke dalam program implementasi yang tepat; jika tidak, para pelaksana akan kekurangan tindakan dan pedoman kerja.
6. Ketersediaan infrastruktur dan ruang kerja. Kapasitas untuk bekerja secara efektif merupakan salah satu indikator efektivitas organisasi. dengan sarana dan prasarana yang tersedia, yang mungkin telah disediakan oleh organisasi.
7. Implementasi yang Efektif dan Efisien Sebaik apapun suatu program, organisasi tidak akan dapat mencapai tujuannya jika tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena dengan adanya implementasi maka organisasi semakin dekat dengan tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan Karena sifat manusia tidak sempurna, struktur organisasi yang efektif memerlukan adanya sistem pengawasan dan pengendalian.

2.1.3 Pendekatan Efektivitas

Efektivitas kegiatan dievaluasi dengan menggunakan pendekatan efektivitas. Efektivitas dapat didekati dengan beberapa cara, antara lain:

a. Pendekatan Target

Pendekatan Target juga dikenal sebagai Pendekatan Sasaran, bertujuan untuk menilai kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan target untuk menentukan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya merupakan langkah pertama dalam mengukur efektivitas. Saat mengevaluasi kemandirian strategi ini, penting untuk mengingat tujuan spesifik yang dapat dicapai dan berdasarkan tujuan resmi, atau "Tujuan Resmi", dengan mempertimbangkan setiap masalah yang mungkin muncul. Dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat keluaran yang direncanakan, hasil yang dicapai dengan menitikberatkan pada aspek keluaran. Akibatnya, strategi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi atau lembaga telah mencapai tujuannya.

Waktu pelaksanaan merupakan aspek lain dari efektivitas yang selalu menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, program akan lebih efektif jika tujuannya tercapai pada waktu yang tepat, karena waktu pelaksanaan selalu menjadi faktor efektivitas." Jika suatu pekerjaan memiliki tujuan untuk menjual barangnya dalam satu minggu dan barangnya terjual habis dalam satu minggu. minggu, maka pekerjaan dapat dianggap efektif. Ini adalah contoh pendekatan target.

b. Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber mengukur keefektifan lembaga dengan menentukan berhasil atau tidaknya memperoleh berbagai sumber yang dibutuhkannya. Agar berhasil, suatu lembaga harus mampu menjaga kondisi dan sistem sekaligus memperoleh berbagai sumber. Strategi ini didasarkan pada gagasan bahwa sistem lembaga terbuka terhadap lingkungannya. Ini karena institusi memiliki hubungan yang mirip dengan lingkungannya, dan sumber daya di lingkungan seringkali langka dan berharga. Hubungan antara anggota program bisnis dengan lingkungan sekitar yang bertujuan menjadi sumber dalam mencapai tujuan, menunjukkan pendekatan sumber dalam kegiatan bisnis organisasi.

c. Pendekatan Proses

Pendekatan proses mempertimbangkan efisiensi dan kesehatan lembaga internal. Proses internal berjalan lancar dalam lembaga yang efisien, dimana kegiatan bagian-bagian yang ada dikoordinasikan. Kegiatan yang dilakukan dengan sumber daya yang dimiliki lembaga, bukan lingkungan, menjadi fokus pendekatan ini, yang menunjukkan tingkat efisiensi dan kesehatan lembaga.

2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.1 Pengertian BUMDes

BUM Desa atau Badan Usaha Milik Desa adalah suatu jenis usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Modal ini digunakan untuk mengelola aset, jasa, dan

usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa. UU No 1 Desa 6 Tahun 2014 memberikan keleluasaan kepada desa untuk menampung seluruh kegiatan ekonomi dan/atau pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desanya melalui pembentukan BUMDes. Karena BUMDes memerlukan sinergi yang harmonis antara Pemerintah Desa sebagai pemilik modal dan masyarakat sebagai pengelola, maka BUMDes memiliki peran yang sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan menjadi pilar demokrasi di pedesaan. Pemerintah desa membentuk lembaga BUMDes yang dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keadaan ekonomi desa. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesepakatan antar masyarakat desa menjadi landasan bagi BUMDes.

Tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa. BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial dengan berkontribusi pada penyediaan layanan sosial yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dan lembaga komersial dengan menyediakan sumber daya lokal dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Menurut Alkadafi (2014), BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya dalam menghadapi Masyarakat.

Menurut PKDSP (2007), ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga komersial lainnya adalah:

1. Desa memiliki usaha yang dikelola bersama.
2. Dana desa sebesar 51% dan dana masyarakat sebesar 49% dari modal usaha.
3. Operasi perusahaan dipandu oleh filosofi bisnis yang diinformasikan oleh budaya lokal.

4. Bidang usaha dijalankan berdasarkan potensi desa dan hasil data pasar yang ada.
5. Berdasarkan peraturan yang telah disusun, BUMDes menggunakan laba untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
6. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Desa memberikan dukungan dana untuk fasilitas tersebut.
7. Pemerintah Desa, BPD, dan anggota bersama-sama mengawasi jalannya BUMDes.

2.2.2 Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Desa Tentang Pendirian BUMDes Desa, BUMDes merupakan bentuk partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, BUMDes didirikan untuk melihat penyaluran prakarsa masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan dan pemanfaatan potensi desa, pembiayaan, dan aset pemerintah desa yang diberikan kepada BUMDes untuk dikelola. Dengan mengurangi penggunaan rentenir dan pencairan dana, BUMDes mencapai tujuan yang jelas dengan memberikan layanan kepada usaha produktif, terutama di masyarakat miskin pedesaan. Selain itu, menurut Ridlwan (2014), pendirian BUMDes bertujuan untuk pemerataan bidang usaha sekaligus meningkatkan pendapatan individu.

Menurut Ridlwan (2014), ada tiga prinsip pedoman pengelolaan BUMDes:

1. Kooperatif, artinya seluruh komponen terlibat dalam pengelolaan BUMDes dan mampu bekerja sama dengan baik

2. Partisipatif, artinya semua komponen wajib memberikan dukungan dan kontribusi secara sukarela atau tidak diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes
3. Emansipatoris, artinya semua komponen diperlakukan sama tanpa membedakan kelas, suku, atau agama.
4. Transparan: Segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan yang berdampak pada kepentingan umum harus diumumkan, dan harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.
5. Akuntabel: Setiap kegiatan teknis dan administratif perlu dijelaskan
6. Sustainabel, dan Di dalam BUMDes, masyarakat menciptakan dan memelihara kegiatan usaha.

2.2.3 Pembangunan Desa Mandiri

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dan asal muasal yang diakui dan dihormati sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Desa adalah desa adat dan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah

pengertian desa yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri adalah desa yang mandiri, dan bantuan pemerintah hanya sebagai stimulus. Perencanaan pembangunan yang partisipatif, terbuka, akuntabel, dan mendalam merupakan komponen pembangunan desa yang mandiri. Kegiatan tersebut melalui serangkaian tahapan, antara lain perencanaan dan persiapan, identifikasi desa secara umum, analisis aset, dan pembahasan rencana pembangunan desa (musrenbangdes).

2.2.4 Dasar Hukum BUMDes

Berikut ini tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Penatausahaan dan Pengurusan, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pendirian Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Memaksimalkan aset Desa agar dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan Desa;
3. Lebih melibatkan pelaku usaha lokal dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Membuat rencana kerjasama bisnis antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Membangun jaringan dan peluang pasar yang mendukung kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik;

6. Menciptakan kesempatan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan dan pemerataan ekonomi Desa, peningkatan pelayanan publik, dan
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Masyarakat. Selain Pasal 1 Angka 7 yang mendefinisikan BUM Desa dan dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengaturan mengenai BUM Desa juga dimuat dalam Bab VIII Tentang Badan Usaha Milik Desa, khususnya dalam artikel berikut:
 - a. Pembentukan dan Organisasi Pengurus, dalam Pasal 132 sampai dengan 134;
 - b. Modal dan Kekayaan Desa, Pasal 135,
 - c. Bagian Anggaran Rumah Tangga dan Statuta Pasal 136;
 - d. Perkembangan Kegiatan Usaha Pasal 137-140:
 - e. Pasal 141 dan 142 mengatur tentang pembentukan BUM Desa Bersama.

2.2.5 Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang BUMDes

BUMDes dapat diatur dengan peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah jika diperlukan. Item berikut harus diatur:

1. Persyaratan umum Istilah-istilah berikut harus digunakan dalam peraturan BUMDes daerah: Daerah; pemerintah di daerah; seorang bupati; Kecamatan; camat; Desa; mengatur desa; mengatur desa; Kepala desa; badan pertimbangan desa; Norma desa; Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa; Aset Desa; Usaha milik desa; Modal adalah BUMDes; dan wilayah kerja BUMDes.

2. Bahan Pengaturan Bahan-bahan berikut ini harus diatur dalam peraturan BUMDes daerah:

- a. Pendirian BUMDes Pemerintah desa berwenang mendirikan atau mendirikan BUMDes dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambah sumber pendapatan awal desa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan desa membentuk BUMDes. BPD yang dibentuk berdasarkan peraturan desa dan hasil musyawarah warga menjadi landasan bagi BUMDes. Peraturan desa sekurang-kurangnya meliputi: maksud dan tujuan; nama lokasi dan domisili wilayah usaha; asas, sifat, dan tujuan perseroan; modal; organisasi dan manajemen; hak dan kewajiban; penentuan dan pemanfaatan keuntungan. Peraturan bersama antar desa digunakan untuk mendirikan BUMDes yang terdiri dari dua (atau lebih) desa. Camat memimpin musyawarah untuk mufakat.
- b. Organisasi BUMDes Organisasi BUMDes merupakan bagian dari pemerintahan desa yang modalnya terdiri dari kekayaan yang terpisah dari kekayaan desa lainnya dan bukan milik kelompok atau perseorangan tertentu. Struktur organisasi BUMDes berbeda dengan pemerintahan desa. Sekurang-kurangnya informasi tentang nama, tempat kedudukan, tujuan, kepemilikan modal, jalannya usaha, dan kepengurusan perusahaan dicantumkan dalam anggaran dasar. Tugas kepengurusan serta hak dan tanggung jawab pengurus sekurang-

kurangnya dituangkan dalam anggaran rumah tangga. Bagaimana mengangkat dan memecat administrator, operasi bisnis seperti apa yang diharapkan, dari mana mendapatkan uang, bagaimana menghasilkan uang, dan apa yang harus dilakukan jika perusahaan bangkrut. Rapat dewan diperlukan untuk mengubah undang-undang dan anggaran rumah tangga untuk setidaknya satu tahun fiskal. Kepala desa dan BPD mengesahkan statuta dan anggaran rumah tangga sebelum mengirimkannya ke bupati melalui camat.

- c. Pengurus BUMDes Penasehat dan pelaksana operasional menyusun pengurus BUMDes. Kepala desa memegang penasehat. Manajer dan kepala unit bisnis merupakan pelaksana operasional. Pelaksana operasional Bumdes diangkat untuk jangka waktu tiga tahun.
- d. Persyaratan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pemberhentian pelaksana operasional BUMDes; mekanisme penunjukan Badan Pengelola BUMDes.
- e. Kewajiban Peringatan dan Spesialis dan Agen Fungsional. Bagian ini mengatur kewajiban dan wewenang konselor dan pelaksana fungsional. Penasihat bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada pelaksana operasional tentang tugas pengelolaan usaha desa. Pengelolaan, pelaksanaan, dan pengembangan usaha ekonomi BUMDes menjadi tanggung jawab pengurus operasional. Pengurus atau direksi operasional mewakili BUMDes baik di dalam maupun di luar pengadilan dan bertanggung jawab kepada pemerintah desa atas segala kegiatan BUMDes.

- f. Macam-macam usaha, permodalan, dan bagi hasil usaha yang dapat dilakukan melalui BUMDes diatur dalam pasal ini.
- g. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Sebagaimana disebutkan dalam bab ini, BUMDes diperbolehkan untuk melakukan kerjasama dengan BUMDes lain dan/atau pihak ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga perlu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah desa harus berkonsultasi sebelum BUMDes dan/atau pihak ketiga dapat mulai bekerja sama.
- h. Mekanisme Pengelolaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Mekanisme pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes dibahas dalam bab ini. Salah satunya adalah keharusan agar pengelolaan BUMDes dilakukan secara akseptabel, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan, dan transparan. Dalam musyawarah desa, kepala pelaksana operasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMDes kepada pemerintah desa dan BPD dengan disaksikan oleh camat.
- i. Pembubaran BUMDes BUMDes dapat dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau apabila selama 2 (dua) tahun terus menerus mengalami kerugian. Nilai nominal saham atau penyertaan pihak berelasi digunakan untuk membagi seluruh aset dan aset BUMDes yang dibubarkan. Kekayaan yang terutang ke kas desa harus langsung ke sisa BUMDes desa yang dibubarkan, yang menjadi miliknya.

- j. Bupati bertugas memberikan arahan, pengawasan, dan pemeriksaan, serta pelatihan teknis pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes diawasi oleh Inspektorat Kabupaten.
- k. Ketentuan Masa Peralihan Setiap jenis kegiatan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa sebelum berlakunya Perda ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUMDes sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.
- l. Ketentuan Penutup Hal-hal yang diatur oleh Peraturan Daerah ini kurang memadai, dalam arti Peraturan Bupati akan mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaannya. Pada tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

2.2.6 Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang BUMDes

Pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah akan dikaji dalam kaitannya dengan pendirian dan pengelolaan BUMDes yang akan diatur dengan peraturan daerah. Pengaturan pembentukan dan pengelolaan BUMDes sesuai dengan peraturan daerah akan memberikan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membentuk dan mengelola badan usaha bersama yang dapat mendukung keuangan desa dalam kaitannya dengan aspek kehidupan masyarakat desa. Selain itu, perda ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan BUMDes. Bentuk badan hukum BUMDes dapat digunakan untuk menyelaraskan lembaga yang ada di desa yang memiliki tujuan yang sama.

Selain itu, peraturan daerah ini dapat memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan BUMDes dalam menjalankan usaha

masyarakat ini. Alhasil, upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi ekonomi masyarakat desa secara maksimal terlihat jelas.

Pengaturan tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan peraturan daerah tidak akan berpengaruh terhadap beban APBD ditinjau dari aspek beban keuangan daerah. Hal ini dikarenakan masyarakat desa membutuhkan sarana, prasarana, dan fasilitas yang berbasis swadaya. Namun, pemerintah daerah dapat membantu di awal pendirian desa bagi desa yang belum memiliki kemampuan untuk mengatur keuangannya, termasuk pengumpulan dana swadaya.

2.2.7 Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa adalah anggaran yang dialokasikan satu kali dalam setahun dan bersumber dari APBN. Setiap tahun, APBD kabupaten atau kota mengirimkan dana desa ini ke desa untuk digunakan. Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal pada skala prioritas desa, dana ini digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi kewenangan desa. mengatur skala prioritas penggunaan dana desa. Permendes (UU No. 6 Tahun 2014; Winara dan Nugrahaningsih, 2016).

Anggaran Desa berasal dari enam sumber:

1. PADesa
2. ADD
3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD)
4. Bantuan keuangan pemerintah pusat-daerah
5. Hibah Kepada Pihak Ketiga
6. Tambahan pendapatan APBD yang sah.

Sementara itu, semua uang yang diterima desa, baik yang berasal dari APBD, kas desa, maupun sumber pendapatan lainnya, disebut sebagai "keuangan desa". TPTPK Desa mengelola keuangan desa. Program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat dibiayai dari dana desa ini. Tujuan peraturan ini adalah untuk membantu memberikan arah, batasan, dan pedoman kepada Desa (Sidik, 2015; Agunggunanto dkk, 2016; Purnamasari dkk, 2016).

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2016, turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo, mengutamakan penggunaan dana desa untuk program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Hanya bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang tercakup dalam PP No. 47/2014. Menurut Purnamasari et al.(2016), tujuan peraturan ini adalah untuk membantu memberikan pedoman, batasan, dan arahan kepada desa.

2.2.8 Jenis-Jenis Pembangunan Desa Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik dan pembangunan non fisik merupakan dua jenis pembangunan desa. Pembangunan fisik diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh suatu negara, bangsa, atau pemerintah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, yang dibuktikan dengan bentuk perubahannya. Perubahan ini dapat dilihat secara konkret. Perkembangan fisik desa mengalami transformasi yang serupa atau hampir identik dengan yang satu ini. Masjid, jalan, perumahan, fasilitas pendidikan, bandara, dan fasilitas umum lainnya, (Sofiyanto et al., 2017). Masyarakat mendapat manfaat dari pembangunan jalan, sarana pendidikan, gedung, dan struktur lainnya disebut juga pembangunan fisik.

2.2.9 Pemberdayaan Masyarakat (Non Fisik)

Pemberdayaan masyarakat mengacu pada strategi untuk menumbuhkan jiwa kemandirian dan membina kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari program pemberdayaan ini adalah untuk mencapai: meningkatkan moral desa, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, sikap, kesadaran diri, kemampuan, dan penggunaan sumber daya yang ada.

Masyarakat dapat menggunakan indikator pengukuran berikut untuk menilai keberhasilan program pemberdayaan (Irawati dan Martanti, 2018):

1. Partisipasi warga dalam setiap kegiatan
2. Jumlah warga yang hadir
3. Pelaksanaan program yang dapat diakses masyarakat dengan cepat dan mudah
4. Jumlah saran dan konsep yang dihasilkan masyarakat.
5. Masyarakat memberikan dukungan dana secara sukarela untuk pelaksanaan kegiatan program
6. Banyaknya kegiatan yang dilakukan petugas untuk memecahkan masalah.
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap masalah kesehatan.
8. Menurunkan jumlah orang yang sakit
9. Meningkatnya respon masyarakat terhadap gaya hidup sehat
10. Peningkatan swasembada kesehatan masyarakat.

2.3 Pendapatan Masyarakat

2.3.1 Pengertian Pendapatan Masyarakat

Penghasilan seseorang atau keluarga adalah apa yang mereka peroleh dari berusaha atau bekerja. Pengabdian masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain: Ramadana (2013) petani, peternak, pedagang, nelayan, buruh, dan individu yang bekerja di sektor publik dan swasta oleh Irawati dan Martanti (2018) dan Fanani (2019). Imbalan atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga dan sektor korporasi, yang dapat berupa sewa, bunga, gaji, atau keuntungan, merupakan definisi lain dari pendapatan (Hendrik, 2011). Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil yang diterima oleh individu dan rumah tangga berupa upah atau gaji selama kurun waktu tertentu itulah yang disebut sebagai pendapatan masyarakat.

Pendapatan dari masyarakat, menurut Rosyidi (2006: 100-101) adalah uang yang masuk dari dunia usaha ke masyarakat dalam bentuk sewa, keuntungan, bunga, dan upah. Selain itu, sewa, upah dan gaji, bunga, keuntungan perusahaan non-perusahaan, dividen, dan pembayaran transfer merupakan pendapatan pribadi.

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Pada intinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh individu, lembaga, atau masyarakat, antara lain:

1. Usia
2. Tingkat pendidikan
3. Pengalaman
4. Modal kerja

5. Produktivitas atau jumlah jam kerja
6. Faktor lainnya.

Menurut Pertiwi (2015), kendala tersebut selalu ada bagi pencari kerja yang memasuki pasar tenaga kerja. Salah satu ukuran kesejahteraan sosial adalah pendapatan. Jumlah kesejahteraan juga lebih tinggi dengan pendapatan. Tingkat pendidikan kepala keluarga, pekerjaan, umur, jumlah anggota rumah tangga, aset yang dimiliki rumah tangga, dan faktor-faktor lain dapat mempengaruhi pendapatan keluarga secara umum. Ketimpangan pendapatan disebabkan oleh berbagai faktor. Inilah faktor-faktornya (Modigliani dan Miller, 1958):

1. Umur
2. Kepribadian atau sifat bawaan
3. Ketidakpastian dan variasi pendapatan
4. Kekayaan yang diwariskan
5. Ketidaksempurnaan pasar
6. Diskriminasi

2.4 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan penelitian terdahulu ini sebagai acuan dalam melakukan penelitian untuk memperkaya teori yang digunakan dalam kajian penelitian. Para penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian mereka sebelumnya. Namun untuk memperkaya bahan kajian dalam penelitian penulis, maka penulis mengutip beberapa penelitian. Berikut adalah daftar penelitian penulis terdahulu yang telah dipublikasikan di sejumlah jurnal dan terkait dengan penelitian tersebut.

Tabel 2 Penelitian terdahulu

No.	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Efektivitas Peran BUMDes terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Panjalu, Nurhasan J & Munawar A 2020.	Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan deskriptif jenis kualitatif-kuantitatif (<i>mix methodes</i>).	Temuan studi menunjukkan bahwa unit usaha masyarakat, seperti rumah tangga, pengelola pasar, dan pengelola unit usaha produktif, melakukan proses pengelolaan BUMDes. Orang bisa mendapatkan pekerjaan baru dengan menggunakan beberapa unit ini. BUMDes bisa menjadi cara yang baik untuk memanfaatkan potensi desa untuk menghasilkan lebih banyak uang bagi masyarakat..	Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah teknik pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu menggunakan metodologi penelitian jenis kualitatif-kuantitatif (<i>mix methodes</i>). Sedangkan penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif.
2.	Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, Nita Mariani & Lilis Suryani (2021)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan besaran 68,87 persen pengelolaan BUMDes di Desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong berjalan efektif.	Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah, membahas tentang bagaimana efektivitas BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Sedangkan perbedaannya ialah, penelitian terdahulu menggunakan jenis metodologi penelitian deskriptif kuantitatif. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
3.	Efektivitas Badan Usaha	Penelitian ini	Menurut temuan investigasi ini,	Persamaan penelitian terdahulu

	<p>Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, Chindy Sasauw, Ronny Gosal, Welly Waworundeng 2018</p>	<p>menggunakan perspektif pendekatan kualitatif</p>	<p>badan usaha milik desa "Aldus" telah mencapai tujuannya dalam hal operasi reguler organisasi BUMdesa dan neraca yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Dampak langsung terhadap masyarakat yang diuntungkan dengan kehadiran Badan Usaha Milik Desa, meskipun belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan, menunjukkan bahwa setiap Pengurus Badan Usaha Milik Desa "aldus" sedang menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangannya. posisi. utuh.</p>	<p>dan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini juga sama mencari tahu pencapaian tujuan suatu organisasi. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti penulis adalah, indikator yang dipakai oleh peneliti terdahulu ialah optimasi tujuan, perspektif sistematika, dan perilaku pegawai dalam organisasi. Sedangkan penulis memakai indikator yaitu, pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.</p>
<p>4.</p>	<p>Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Bayumas, Nurchayuni, Hijroh Rokhayati, Rasyid Mei Mustafa, Meilena Sarmilasari, 2022</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif</p>	<p>Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan awal organisasi untuk mencapai tujuannya belum tercapai, adaptasi dan integrasi telah berjalan dengan baik.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis ialah, penelitian terdahulu mempunyai 3 usaha bumdes, yaitu perkebunan pisang, Cavendish, investasi sembako, dan pembuatan pupuk. Sedangkan</p>

				penelitian penulis dalam usaha bumdes tersebut hanya pemasaran sembako.
5.	Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang), Dicky Dwi Wahyudi, Hanny Purnamasari Gun Gun Gumilar, 2022	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Kajian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan BUMDes usaha perkebunan pisang adalah memaksimalkan pemeliharaan pisang, memperluas lahan perkebunan, dan mempublikasikan hasil dan kegiatan usaha BUMDes. Di sisi lain, strategi pengelolaan BUMDes untuk usaha investasi sembako adalah meningkatkan investasi dan menjual hasil produksi ke luar desa. Fakta bahwa BUMDes mampu secara efektif menyumbangkan pendapatan asli desa kepada pemerintah desa menunjukkan efektivitasnya dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Tidak semua indikator pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi tercapai secara maksimal.	Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dari peneliti terdahulu dan penelitian penulis adalah, penelitian terdahulu dalam indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi tidak terealisasi. Sedangkan penelitian penulis dalam indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, yang tidak terealisasi yaitu adaptasi .

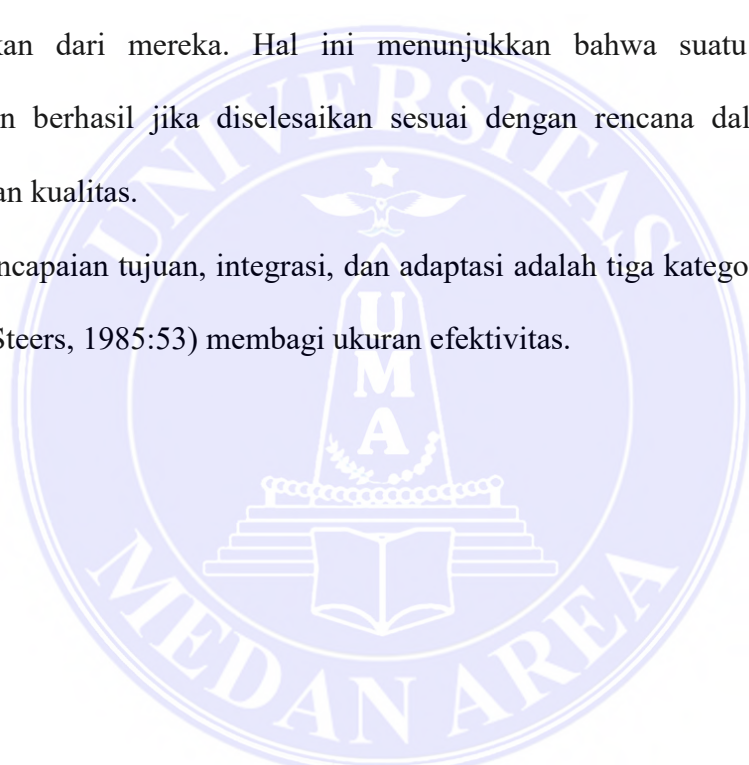
Sumber: penulis (2023)

2.5 Kerangka Berpikir

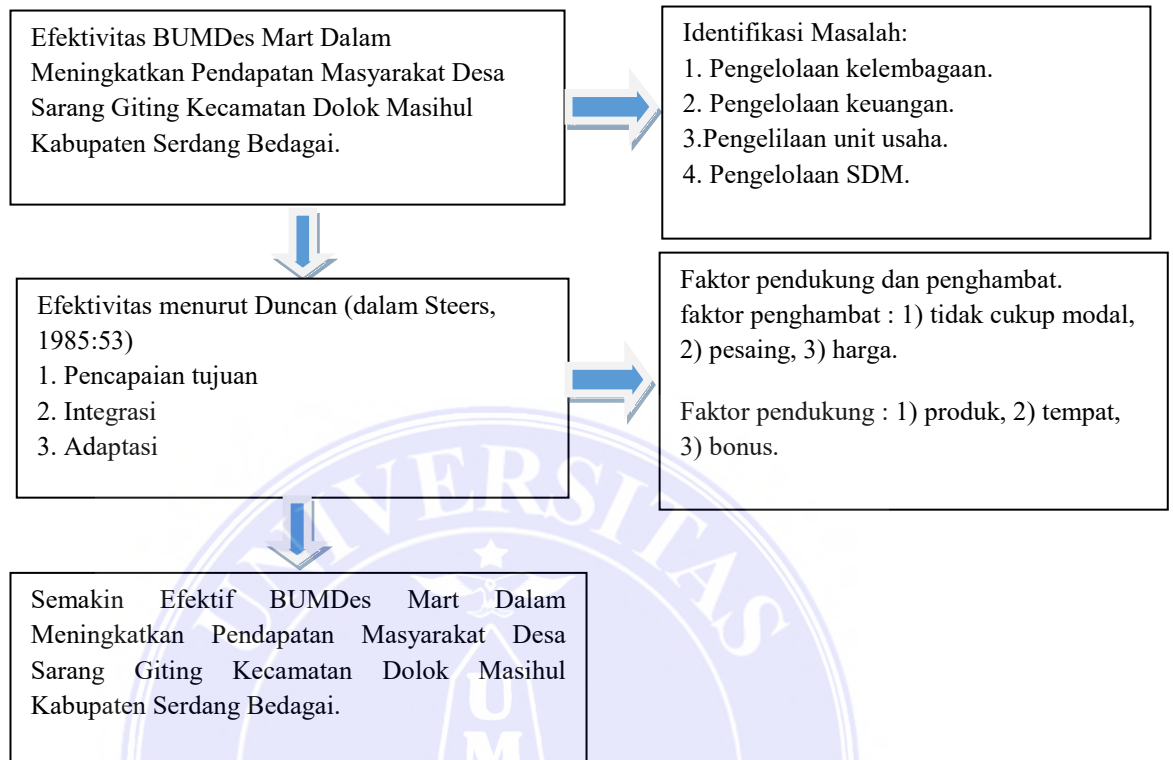
Adisasmita (2011:170) berpendapat bahwa efektivitas adalah suatu keadaan atau keadaan dimana tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan apabila memilih tujuan yang akan dicapai dan metode atau peralatan yang digunakan.

Ravianto (2014:11) juga menjelaskan konsep efektifitas, yaitu seberapa baik pekerjaan dilakukan dan seberapa banyak orang menghasilkan apa yang diharapkan dari mereka. Hal ini menunjukkan bahwa suatu proyek dapat dikatakan berhasil jika diselesaikan sesuai dengan rencana dalam hal waktu, biaya, dan kualitas.

Pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi adalah tiga kategori yang Duncan (dalam Steers, 1985:53) membagi ukuran efektivitas.



Tabel 3 Kerangka Berpikir



Sumber : Penulis, 2022

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif sebagai metode penelitiannya. Efikasi BUMDes Mart menjadi fokus desain penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti. Untuk mengumpulkan data, wawancara atau pengamatan langsung terhadap informan diperlukan, dan peneliti tidak dapat menawarkan hipotesis sementara mengenai kejadian tersebut.

Dalam penelitian Moleong (2014:4), penelitian kualitatif adalah suatu metode yang menggunakan perilaku orang-orang yang dapat diamati untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.

Metode penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena yang dievaluasi dalam kaitannya dengan subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. secara deskriptif melalui penggunaan bahasa dan kata-kata, dalam ruang lingkup tertentu, dan melalui berbagai cara alami. Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif dapat menghasilkan temuan penelitian berupa uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dalam ruang lingkup yang telah ditentukan dari perspektif holistik.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan tuturan, tulisan, dan perilaku yang diamati untuk menjelaskan atau mendeskripsikan data.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung di daerah Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

Tabel 4 Waktu Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agustus 2023	September 2023
1.	Pengajuan proposal	■											
2.	Penyusunan proposal		■	■	■	■							
3.	Seminar proposal						■						
4.	Perbaikan proposal							■					
5.	Pengambilan data/penelitian								■				
6.	Penyusunan skripsi									■	■		
7.	Seminar hasil											■	
8.	Perbaikan skripsi												■
9.	Siding meja hijau												■

Sumber : Peneliti, 2023

3.3 Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian kualitatif, pemilihan informan harus diperhatikan. Informan adalah orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang subjek yang ada dan bersedia memberikan informasi kepada peneliti.

Posisi narasumber sangat penting dalam penelitian kualitatif. Saat mengumpulkan

data untuk menjawab pertanyaan penelitian, informan merupakan pusat dari proses penelitian.

Moleong (2014:169) menjelaskan bahwa informan adalah seseorang yang diharapkan mampu memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi latar penelitian, sehingga diperlukan latar belakang pengetahuan penelitian yang luas. Karena penelitian ini mengkaji tentang kemampuan BUMDes Mart dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai maka pemilihan informan menjadi langkah utama seperti yang telah dijelaskan di atas.

Menurut Bagong (Suyanto 2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan Kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Tabel 5 Informan Penelitian

No	Nama	Informan kunci	Informan utama	Informan tambahan
1.	Frans Bastanta Sembiring (Kades)	1	-	-
2.	Hotnida Wati Harahap (Sekdes)	-	1	-
3.	Rizka Indriyani (Ketua BUMDes)	-	1	-
4.	Eka (masyarakat)	-	-	1
5.	Indah (masyarakat)	-	-	1
6.	Uut (masyarakat)	-	-	1

Sumber : penulis, 2022

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah deskripsi metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data:

3.4.1 Pengamatan (Observation)

Menurut Satori Dham'an dan Komariah Aan (2012:105) dan Ufie (2013:42), dalam mengumpulkan data, observasi diartikan sebagai melakukan pengamatan langsung terhadap objek dalam rangka mempelajari situasi, keberadaan objek, konteks, dan makna. Peneliti ini akan mengamati langsung subjek penelitian dan mencatat detail tentang bagaimana DesMart membantu masyarakat desa Sarang Giting meningkatkan perekonomiannya.

3.4.2 Wawancara

Istilah "wawancara" mengacu pada percakapan yang terjadi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai untuk tujuan tertentu. Orang yang melakukan wawancara disebut sebagai pewawancara, sedangkan orang yang

menjawab pertanyaan disebut sebagai yang diwawancarai Moleong (2014:186). Dalam penelitian ini, pertanyaan diajukan langsung kepada bagian-bagian yang terlibat dalam kontribusi DesMart terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di desa Sarang Giting.

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Moleong (2014:160) berpendapat bahwa analisis dokumentasi dapat digunakan karena stabilitas, kekayaan, dan dorongannya, serta kealamiannya dalam kaitannya dengan konteks eksternal. Untuk menjamin keakuratan data dan proses penelitian, penelitian ini sangat mengandalkan dokumentasi sebagai sumber data. Selain itu, file dokumentasi akan berfungsi sebagai bukti validitas penelitian. Dalam hal ini, dokumen, gambar, atau video yang dikumpulkan selama proses penelitian merupakan dokumentasi. Fakta dan data yang diperoleh sebagian besar terekam dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk dokumentasi lainnya, oleh karena itu dokumentasi menjadi sangat penting. Dalam penelitian ini informasi tentang dampak DesMart terhadap perekonomian desa Sarang Giting didokumentasikan dengan membaca data atau catatan.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan perluasan dari pengolahan data. merenungkan hubungan antara data dan kemungkinan latar belakang yang menghasilkan persamaan atau perbedaan, kemudian mendiskusikan hasil analisis data. Analisis bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, memberikan

tanggapan terhadap setiap rumusan masalah, menarik kesimpulan, dan membuat rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Pendekatan analisis deskriptif komparatif digunakan dalam penelitian ini. yang nantinya akan peneliti uraikan, sehingga bentuk analisis yang digunakan adalah penjelasan bukan data statistik, berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan sumber lain selama proses penelitian. Temuan analisis kemudian dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Moleong (2014), Miles dan Huberman (1992:15), analisis kualitatif dapat dilakukan secara terus menerus (interaktif) sampai data habis. teknik untuk menganalisis data, antara lain:

3.5.1 Pengumpulan data

Data deskriptif dan reflektif yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan catatan lapangan atau dokumentasi data. Catatan alami, atau catatan tentang sesuatu yang telah didengar, dilihat, atau dialami peneliti tanpa membuat asumsi atau interpretasi apa pun tentang fenomena yang telah dialami, disebut catatan deskriptif. Isi catatan refleksi adalah kesan, komentar, dan pendapat mengenai temuan yang ditemukan serta rencana pengumpulan data selanjutnya.

3.5.2 Reduksi data

Proses reduksi data melibatkan pencarian tema dan pola, mengkategorikan informasi penting, meringkasnya, dan membuang informasi yang tidak perlu. Gambaran yang jelas dan langkah-langkah pengumpulan data yang akan datang akan muncul dari reduksi data nanti. Dalam penelitian ini, beberapa temuan dari

penelitian lapangan akan disaring melalui rangkuman awal observasi dan wawancara dengan sejumlah informan yang telah ditentukan.

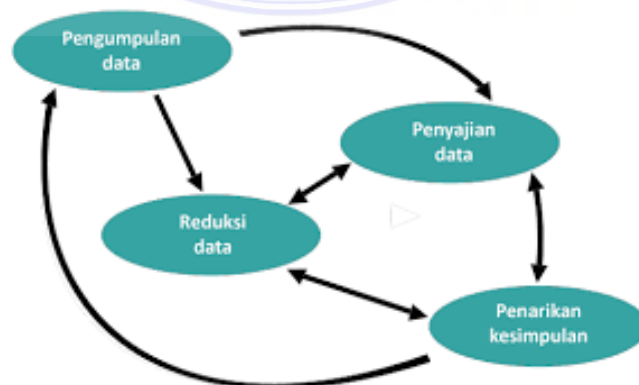
3.5.3 Penyajian Data

Data dapat disajikan dalam bentuk tulisan, gambar, grafik, tabel, atau keduanya. Menggabungkan informasi untuk menggambarkan situasi yang terjadi adalah tujuan penyajian data. Peneliti membuat narasi, matriks, atau grafik untuk memudahkan mereka menguasai informasi data karena mereka tidak kesulitan menguasainya dengan semua atau sebagian tugas dari hasil penelitian. Akibatnya, peneliti dapat mengontrol data dan menghindari penarikan kesimpulan yang tidak berarti.

3.5.4 Menarik kesimpulan

Kesimpulan awal masih tentatif dan dapat berubah jika ditemukan bukti tambahan. Namun, kesimpulan yang telah dikemukakan dianggap dapat diandalkan atau kredibel jika pada awalnya dapat didukung oleh bukti-bukti yang valid atau valid dan konsisten.

Gambar 3 Analisis Data Miles dan Huberman (1992:15)



Sumber : Model Miles dan Huberman (1992)

3.6 Defenisi Konsep Dan Operasional

Definisi konseptual dan operasional variabel diperlukan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, menganalisis hasil, dan memilih subjek wawancara. Dalam penelitian ini, definisi konseptual dan operasional variabel adalah sebagai berikut:

3.6.1 Definisi Konsep

1. Efektivitas

Konsep efektivitas dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap operasi organisasi. Gagasan ini adalah salah satu hal yang menentukan apakah struktur dan manajemen organisasi perlu banyak berubah atau tidak. Dalam konteks ini, efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya input, proses, dan output secara efektif. Ketersediaan personel, sarana, dan prasarana, serta metode dan model yang digunakan, semuanya dianggap sebagai sumber daya dalam konteks ini. Suatu kegiatan yang dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur dianggap efisien, sedangkan bila dilakukan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat maka dianggap efektif.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes dibentuk dan dibentuk oleh pemerintah desa. Masyarakat dan pemerintah desa bertanggung jawab atas kepemilikan dan pengelolaan modal. BUMDes merupakan pilar ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang bekerja untuk

kepentingan terbaik masyarakat dan menghasilkan uang. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa merupakan jenis usaha yang menghasilkan suatu produk yang dapat meningkatkan keuangan desa.

3. Pendapatan Masyarakat Desa

Yang dimaksud dengan “pendapatan masyarakat” adalah gaji bulanan seseorang atau kelompok atau imbalan lain dari suatu usaha yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, penghasilan dari usaha sampingan adalah penghasilan tambahan yang berasal dari sumber lain selain dari kegiatan atau pekerjaan utama. Penghasilan sampingan langsung dapat digunakan untuk menambah atau menambah penghasilan utama.

3.6.2 Pengertian Operasional

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongkret, (3) dasar hukum (Duncan, dalam Steers 1985:53).

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) prosedur (2) proses sosialisasi. (Nazarudin, dalam Claude 1994:13).

3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana. (Duncan, dalam Steers 1985:53).

Sehubungan dengan hal di atas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari manajemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa sarang giting kecamatan dolok masihul kabupaten serdang bedagai, dengan menggunakan data observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan yang berkaitan dengan Efektivitas BUMDes Mart dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa, maka ditarik kesimpulan bahwa BUMDes Mart tersebut belum berjalan optimal. Berdasarkan ukuran efektivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan yang dilakukan oleh BUMDes Mart Sarang giting sudah sesuai, dengan kurun waktu pencapai tujuan yang berkelanjutan yang dimana untuk memanfaatkan dana desa. Sasaran target yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sarang giting dan desa untuk meningkatkan pendapatan dana desa dan juga mempermudah masyarakat dalam berbelanja Dan yang terakhir, dasar hukum yang bertumpu pada ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan melakukan musyawarah untuk menentukan peraturan yang sesuai dengan menjalankan BUMDes Mart. Prosedur yang dilaksanakan sesuai dengan internal BUMDes, yang dimana kepala desa memberikan saran untuk baiknya pengelolaan BUMDes Mart. Dan untuk prosedur pendanaan disalurkan dari dana desa. Dan proses sosialisasi yang dilakukan dengan optimal sesuai dengan arahan kepada desa kepada kepala dusun, dan kepala dusun menyampaikan kepada masyarakat sarang giting. Adaptasi BUMDes Mart Sarang Giting, peningkatan kemampuan yang dilakukan terhadap kader

BUMDes tidak optimal sehingga harus dilakukan pengkaderan ataupun pelatihan sesuai dengan prosedur. Dan untuk sarana dan prasarana sudah cukup memadai, sehingga konsumen nyaman dalam berbelanja.

2. Dalam hambatan BUMDes Mart Sarang Giting dalam meningkatkan pendapatan asli desa sarang giting, pengelolaan BUMDes Mart belum mencapai pada tujuan organisasi. Hal tersebut terkendala karena kurangnya anggaran dalam proses pelaksanaan usaha. Tetapi kendala anggaran pada BUMDes Mart membuat kinerja pengelolaannya kurang berkembang dan mempengaruhi kontribusi untuk pendapatan desa sarang giting.

5.2 Saran

1. Efektivitas BUMDes Mart di desa sarang giting berdasarkan hasil wawancara termasuk baik. Hal ini hendaknya terus ditingkatkan melalui dimensi-dimensi dan indikator-indikator tentang efektivitas BUMDes Mart serta tetap mengontrol berjalannya BUMDes Mart tersebut.
2. Pihak desa hendaknya segera mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pengelola BUMDes Mart dalam meningkatkan efektivitas BUMDes Mart dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Perangkat desa hendaknya lebih meningkatkan SDM pelaksana dan meningkatkan pelatihan, serta penambahan dana atau anggaran, untuk terjalannya BUMDes Mart dengan baik. Kepada masyarakat hendaknya dalam berbelanja tidak membenarkan dengan model berbelanja menghutang, karena mengakibatkan tidak optimalnya pendapatan dan juga pengelolaan BUMDes Mart tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group
- Claude, Nazrudin. 1994. *Intergrasi Ketahanan Sosial*. Jakarta: Erlangga
- J.Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Internet :

- BUMDes Mart Bersaudara Dolok Masihul Diresmikan/
<https://beritaanda.net/bumdes-mart-bersaudara-dolok-masihul-diresmikan/> Kamis, 16 Jan 2020/Kamis, 23 Nov 2022
- Monev di Kecamatan Dolok Masihul, Soekirman Minta Kades Giatkan BUMDes/
<https://sumutpos.co/monev-di-kecamatan-dolok-masihul-soekirman-minta-kades-giatkan-bumdes/26/08/2020/23/11.2022>

Jurnal :

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Alkadafi, M. (2014). *Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015*.
- Agunggunanto, Edy Yusuf et al. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis. Vol. 13, No. 1.
- Arman, S., (2008), *Visi Dan Misi Perusahaan, The Global Source for Summaries & Reviews*.
- Aryanto, Bambang. (2009). *Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terhadap Penerapan Demokrasi di Tingkat Pemerintahan Desa*.
- A.S. Moenir, 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Bumi Aksara : Jakarta. Hlm 88
- Azhar Susanto. 2000. *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. Linggajaya. Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN).

- Hendrik. (2011). *Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besara dan Danau Bawah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*. Provinsi Riau. Jurnal Perikanan dan Kelautan, No.16, Vol. 1, 21-32.
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2018). *Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Pelaporan Aset Desa* (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). UNEJ e-Proceeding, 41-51.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Modigliani, F & Miller, M.H. 1958. *The Cost of Capital, Corporation Finance and The Theory of Investment*. The American Economic Review. 13(3): 261- 297.
- Nugrahaningsih, Putri, Falikhatun Falikhatun, and Jaka Winarna. "Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bum Des) Menuju Desa Mandiri." Jurnal Akuntansi dan Bisnis 16, no. 1 (2016): 37-45.
- Pertiwi, Dian. Azlina, Nur. 2015. *Pengaruh Karakteristik Personal Auditor Terhadap Tingkat Penerimaan Penyimpangan Perilaku dalam Audit dan Kualitas Hasil Audit*. Jurnal Akuntansi. Vol.4. FE Universitas Riau.
- Purnamasari, Hanny, S.Sos., 2016. M.A.P et al. Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. EISSN: 2528 – 2069. Jurnal Politikom Indonesia Vol. 1 No. 2.
- Ramadana, C.B., 2013. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*. Jurnal Administrasi Publik, 1(6), pp.1068-1076.
- Ravianto J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta. Binaman Aksara,
- Ridlwani, Zulkarnain. 2014. *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengelola Pembangunan Perekonomian Desa*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8. No. 3.
- Rosyidi, Suherman. (2006). *Pengantar Teori Ekonomi. Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sidik, Fajar. 2015. *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik. Volume 19 No 2. November 2015
- Sondang P.Siagian, 2005, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.
- Sofiyanto, Moh, et. All. 2017 "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang". Jurnal Riset Manajemen Vol.06 No.04.
- Steers, Richard M, Terj: Magdalena Jamin, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1980
- Steers, Richard.M.(1985). *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku (Alih Bahasa Magdalena)*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



LAMPIRAN

Lampiran Wawancara

1. Pencapaian tujuan

- a. Kurun waktu pencapaian di Tentukan
 - Bagaimana kurun waktu pencapaian tujuan yang ditentukan dalam Efektivitas badan usaha milik desa mart dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa sarang giting kecamatan dolok masihul kabupaten serdang bedagai?
 - Faktor apa yang menghambat kurun waktu pencapian tujuan yang ditentukan dalam efektivitas badan usaha milik desa mart dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa sarang giting kecamatan dolok masihul kabupaten serdang bedagai?
- b. Sasaran Target yang Kongkrit
 - Bagaimana sasaran target yang kongkrit dalam Efektivitas badan usaha milik desa mart dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa sarang giting kecamatan dolok masihul kabupaten serdang bedagai?
 - Faktor apa yang menghambat sasaran target yang kongkrit dalam efektivitas badan usaha milik desa mart dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa sarang giting kecamatan dolok masihul kabupaten serdang bedagai?
- c. Dasar Hukum
 - Bagaimana dasar hukum dalam Efektivitas badan usaha milik desa mart dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa sarang giting kecamatan dolok masihul kabupaten serdang bedagai?
 - Faktor apa yang menghambat dasar hukum dalam efektivitas badan usaha milik desa mart dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa sarang giting kecamatan dolok masihul kabupaten serdang bedagai?

2. Integrasi

- a. Prosedur
 - Bagaimana prosedur dalam Efektivitas badan usaha milik desa mart dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa sarang giting kecamatan dolok masihul kabupaten serdang bedagai?
 - Faktor apa yang menghambat prosedur dalam efektivitas badan usaha milik desa mart dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa sarang giting kecamatan dolok masihul kabupaten serdang bedagai?
- b. Proses Sosialisasi
 - Bagaimana proses sosialisasi dalam Efektivitas badan usaha milik desa mart dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa sarang giting kecamatan dolok masihul kabupaten serdang bedagai?
 - Faktor apa yang menghambat proses sosialisasi dalam efektivitas badan usaha milik desa mart dalam meningkatkan pendapatan

masyarakat desa sarang giting kecamatan dolok masihul kabupaten serdang bedagai?

3. Adaptasi

a. Peningkatan Kemampuan

- Bagaimana peningkatan kemampuan dalam Efektivitas badan usaha milik desa mart dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa sarang giting kecamatan dolok masihul kabupaten serdang bedagai?
- Faktor apa yang menghambat peningkatan kemampuan dalam efektivitas badan usaha milik desa mart dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa sarang giting kecamatan dolok masihul kabupaten serdang bedagai?

b. Sarana dan Prasarana

- Bagaimana sarana dan prasarana dalam Efektivitas badan usaha milik desa mart dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa sarang giting kecamatan dolok masihul kabupaten serdang bedagai?
- Faktor apa yang menghambat sarana dan prasarana dalam efektivitas badan usaha milik desa mart dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa sarang giting kecamatan dolok masihul kabupaten serdang bedagai?

Lampiran Gambar



Gambar 1. Kantor desa dan bumdesmart Sarang Giting



Gambar 2. Wawancara dengan kepala desa sarang giting Frans Bastanta Sembiring



Gambar 3. Wawancara dengan sekretaris desa Sarang Giting Hotnida Wati Harahap



Gambar 4. Wawancara dengan Ketua BUMDes Mart Sarang Giting Rizka Indriyani




Gambar 5. Wawancara dengan masyarakat Desa Sarang Giting Ibu Eka



Gambar 5. Wawancara dengan masyarakat Desa Sarang Giting Ibu Indah dan Ibu Uut

Lampiran Surat Pengambilan Data/Riset

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 689 /FIS.2/01.10/N/2023
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

10 Mei 2023

Yth,
**Kepala Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
Di Tempat**

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :


Nama : Juniper Panjaitan
N P M : 198520177
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di **Kantor Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai**, dengan judul Skripsi "*Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Mart Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai*"




Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-

Lampiran Surat Keterangan Selesai Pengambilan Data/Riset



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN DOLOK MASIHUL
DESA SARANG GITING

KODE POS: 20991

Sarang Giting, 13 Juni 2023

Nomor : 18.44.19 / 410 / 51 / 2023
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth,
Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
di -
Tempat

Sehubungan dengan Surat Permohonan untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa FISIP UMA di Desa Sarang Giting Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah ini:

Nama : Juniper Panjaitan
N P M : 198520177
Program Studi : Administrasi Publik

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami *Mengizinkan dan Memberikan Kesempatan* kepada mahasiswa Ibu, tersebut diatas untuk melakukan Pengambilan Data/Riset di Desa Sarang Giting.

Demikian disampaikan, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Sarang Giting
Kecamatan Dolok Masihul

FRANS BASTANTA SEMBRING